

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Konflik Laut China Selatan yang telah terjadi selama kurang lebih 30 tahun kini mulai memanas kembali dan mulai mengancam persatuan ASEAN. Konflik ini mampu memecah suara ASEAN dan ini terbukti pada KTT ASEAN di Kamboja bulan Juli lalu. Pada KTT ASEAN Juli lalu, ASEAN gagal dalam *Joint Communique*.

Berdasarkan kegagalan *Joint Commuinique* itulah, Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik ini dengan *ASEAN way* dan *soft diplomacy* ala Indonesia. Dimulai Juli Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa melakukan *shuttle diplomacy* dengan mulai mengunjungi negara – negara ASEAN yang turut bersengketa di dalamnya, diantaranya Vietnam.

Meski Indonesia bukanlah salah satu negara yang turut bersengketa, namun sebagai salah satu negara yang tergabung dalam forum ASEAN dan juga negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan ini Indonesia turut melakukan berbagai upaya guna mencapai perdamaian di kawasan ini. Untuk itulah penulis itulah tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Peran Aktif Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan”**

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kawasan Asia Pasifik saat ini sedang dalam kondisi tidak menentu akibat berbagai konflik sengketa wilayah di kawasan ini. Belum usai sengketa klaim Pulau Senkaku/ Diayou antara China dan Jepang, kawasan ini pun kini kembali memanas dengan kembali memanasnya konflik Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara di kawasan ini termasuk diantaranya China, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km<sup>2</sup>. Laut China Selatan merupakan wilayah perairan terluas kedua setelah kelima samudera di dunia. Secara geografis, Laut China Selatan memiliki potensi dan peran yang sangat besar bagi jalur perdagangan dunia sebagai jalur pelayaran internasional dan jalur distribusi minyak. Selain jalur perdagangan dunia, Laut China Selatan juga memiliki potensi alam yang begitu besar, di dalamnya terdapat kandungan minyak bumi dan gas. Kawasan ini juga dilalui oleh armada angkatan laut negara-negara maju, diantaranya armada angkatan laut Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang dan Australia.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia,

Brunei, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.

Bila dilihat dalam tata Laut Internasional, kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis, ekonomis, dan politis. Sehingga kawasan laut ini memiliki potensi konflik dan kerja sama yang tinggi. Selain karena kawasan Laut Cina Laut Selatan merupakan jalur perdagangan dan pelayaran internasional serta jalur distribusi minyak, kawasan ini juga memiliki kandungan kekayaan alam yang sangat besar. Sehingga menjadikan kawasan ini sebagai objek sengketa klaim wilayah siapa pemilik kawasan ini sesungguhnya. Klaim-klaim kepemilikan atas wilayah ini semakin mewarnai dinamika konflik tersebut. Beberapa negara yang turut mengklaim atas kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan diantaranya adalah China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Sejatinya konflik Laut Cina Selatan sudah terjadi lebih dari 20 tahun lamanya sejak 1974 hingga 2011.<sup>1</sup> Namun, ketegangan yang baru-baru ini terjadi menimbulkan suatu kekhawatiran baru di kawasan ini dan semakin mengancam ketahanan dan keamanan dunia. Titik sengketa Laut Cina Selatan adalah Kepulauan Spratly, sengketa atas kepemilikan kepulauan Spartly dan kepulauan Parcel

---

<sup>1</sup> KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011 *Singapura Desak Cina Jelaskan Klaim*. Diakses tanggal 19 Oktober 2012

mempunyai riwayat yang panjang dan berbatasan dengan wilayah perairan dari beberapa negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan, China) dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian Utara. Hal inilah yang mengakibatkan klaim wilayah diantara negara-negara tersebut.

Selain itu masalah energy juga menjadi penyulut sengketa antara China dan beberapa negara ASEAN di kawasan ini. Pada tahun 1968 ditemukan cadangan minyak di kawasan ini dan dengan ditemukannya cadangan-cadangan minyak tersebut menimbulkan dugaan bahwa di pulau Spratly dan Paracel terkandung cadangan minyak yang begitu besar. Karena seperti yang ditenggarai, sembilan titik yang dipersengketakan tersebut memiliki cadangan minyak mentah hingga 30 milyar metrik ton dan 16 triliun meter kubik gas.<sup>2</sup> Selain cadangan minyak mentah yang dimilikinya, di kawasan ini juga memiliki kekayaan laut yang luar biasa yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Dalam sejarahnya, wilayah Laut China Selatan memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu antara China dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan lainnya yang sebagian besar merupakan negara anggota ASEAN dan memiliki beberapa masalah territorial, keamanan, dan kedaulatan. Konflik ini melibatkan enam negara sebagai pengklaim

---

<sup>2</sup> Media Indonesia. Edisi Selasa, 17 Juli 2012. *Terbelah Digoyang Sengketa Laut China Selatan*. Diakses tanggal 19 Oktober 2012

secara langsung dan menyangkut kepentingannya besar negara lainnya. Sengketa wilayah ini telah mengakibatkan berulang kali pergolakan dan konflik di kawasan Asia Tenggara khususnya. Bentrokan yang paling parah dalam beberapa dekade ini adalah antara Vietnam dan Cina. Cina menguasai Paracel dari Vietnam tahun 1974, menewaskan beberapa tentara Vietnam. Pada tahun 1988, kedua belah pihak bertrok di Spratly, dan Vietnam lagi-lagi harus kembali kehilangan 70 personil. Akhir-akhir ini pasca peristiwa 11 Mei 2011 dimana Vietnam melalui Kementrian Luar Negerinya menyatakan bahwa kapal Vietnam menemukan fakta bahwa kapal-kapal China memutuskan kabel-kabel eksplorasinya, hal inilah yang kemudian memicu kemarahan Vietnam yang menyatakan bahwa China telah melakukan klaim sepihak dan beberapa kejadian yang membuat konflik ini semakin panas; antara lain pada April 2012, ketika kapal China dan Filipina saling berhadapan di Beting Scarborough, salah satu pulau di Laut China Selatan yang terletak di lepas pantai Filipina Barat.

Persengketaan di kawasan ini bukan hanya mencakup kedaulatan territorial, namun juga mencakup kedaulatan maritimnya juga. Kedaulatan territorial yaitu membahas mengenai kepemilikan wilayah yang ada di daerah sengketa sementara kedaulatan maritime berhubungan dengan penetapan batas yang diijinkan oleh Hukum Konvensi laut PBB (UNCLOS) tahun 1982.

Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk baru ancaman keamanan pasca perang dingin dikawasan ASEAN. Melihat situasi yang semakin

rumit, maka ASEAN mulai bertindak dan ikut turun tangan menanggapi persoalan klaim teritorial yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan. Karena jika konflik ini tidak ditanggapi dengan serius dan dibiarkan begitu saja maka segala bentuk kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan bisa kehilangan daya dukung dan tidak berkelanjutan selain itu juga dapat mengancam keamanan negara-negara ASEAN, dan sekitarnya.<sup>3</sup> Sepuluh negara anggota ASEAN sepakat mempercepat proses implementasi perilaku yang harus menjadi pegangan sejumlah negara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan. Yakni dengan diadakannya *Declaration on the Conduct of Parties* (DOC) yaitu hukum yang mengikat pihak-pihak yang bertikai. ASEAN juga menunjukkan keinginan untuk memulai penyusunan dan pembahasan kode etik DOC, yang kemudian akan dibahas dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dan diterapkan di wilayah perairan itu.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam komunitas ASEAN, seyogyanya Indonesia satu suara dan berada dalam perahu yang sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Terlebih ASEAN menjadi salah satu pilar politik luar negeri Indonesia, menjadi inti atau dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif.<sup>5</sup> Politik luar negeri Indonesia menerapkan pendekatan-pendekatan strategis lingkaran-lingkaran konsentrik yang menegaskan kedekatan geografis dan lingkup pengaruh

---

<sup>3</sup>KOMPAS edisi, Rabu 1 juni 2011 *Isu Laut Cina Selatan Harus Dituntaskan*. Diakses tgl 19 oktober 2012

<sup>4</sup>KOMPAS edisi, Kamis 9 juni 2011 *Laut Cina Selatan Dibahas*. Diakses tgl 19 oktober 2012

<sup>5</sup> Bantarto Bandoro. *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta. 2005. Hal.53

lingkungan eksternal dapat memberikan dampak terhadap Indonesia.<sup>6</sup> Dalam kaitan ini, Asia Tenggara merupakan lingkaran konsentris pertama kawasan terdekat Indonesia, oleh karena itu Indonesia telah menetapkan Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) sebagai soko guru atau salah satu pilar utama dalam pelaksanaan politik luar negerinya,<sup>7</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 22 Maret 1973 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara bidang hubungan luar negeri.

Karena itulah integritas ASEAN, keamanan ASEAN, ketahanan ASEAN, dan kolektivitas ASEAN menjadi tanggung jawab seluruh anggota ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya. Oleh karena itu dalam konteks konflik Laut China Selatan, Indonesia memilih untuk turut berperan aktif mencari solusi penyelesaian sengketa ini dengan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini.

Ketegangan di wilayah ini diyakini akan semakin meningkat jika masing-masing pihak yang bersengketa tidak surut dari posisinya. Sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, Indonesia akan terus aktif berperan untuk menciptakan perdamaian di kawasan ini. Saat ini Indonesia sedang mengupayakan penyelesaian konflik ini dengan *ASEAN way*, dengan unsur-unsur diplomasi di dalamnya salah satunya dengan disusunnya *Code of Conduct* yaitu hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa dalam konflik Laut China Selatan ini .

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang edisi 2008*. Jakarta: Departemen Luar Negeri republik Indonesia. 2008. Hal.167

<sup>7</sup> *Ibid*

Pasca kegagalan *Joint Communique* pada KTT ASEAN di Kamboja Juli 2012 lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa melakukan lawatan di beberapa negara ASEAN terkait penyelesaian konflik Laut China Selatan. Pada salah satu lawatannya di Vietnam Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa mengutarakan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh bahwa kedua negara berhasil mendiskusikan beberapa ide yang berkaitan dengan hal-hal yang mempersatukan ASEAN.<sup>8</sup> Ide tersebut diidentifikasi enam prinsip utama, antara lain:

- i. Perlunya reaffirmasi mengenai *the Declaration on the Conduct of Parties* kepada semua pihak di Laut China Selatan
- ii. Perlunya afirmasi *guidelines* DOC
- iii. Perlunya afirmasi mengenai pentingnya suatu *Code of Conduct*
- iv. Penghormatan terhadap hukum internasional dan
- v. Konvensi PBB mengenai Hukum Laut UNCLOS, serta
- vi. Penyelesaian masalah secara damai sesuai dengan UNCLOS<sup>9</sup>

Selain melakukan lawatan di kawasan ASEAN, pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi di Jakarta Agustus lalu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan stabilitas di kawasan Laut China Selatan. Dalam pertemuan ini Presiden Indonesia dan Menteri Luar Negeri China menggaris bawahi pentingnya

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*



ASEAN serta China untuk fokus pada penyusunan deklarasi tata berperilaku (DOC) menuju kode tata perilaku (COC).<sup>10</sup>

Upaya Indonesia dalam menengahi dan menyelesaikan konflik di Laut China Selatan sudah dimulai sejak tahun 1990. Sejak tahun 1990 Indonesia telah memprakarsai diadakannya lokakarya membahas Laut China Selatan yang bertajuk *Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea* dan diselenggarakan di Bali. Runtutan lokakarya inilah yang akhirnya membuka jalan untuk mengesahkan *Declaration on the Conduct in the South China Sea* tahun 2002. Lokakarya-lokakarya tersebut diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar, Surakarta, Jakarta dan yang terakhir berlangsung di Bandung pada tanggal 22-24 November 2012. Lokakarya ini bertujuan untuk mempertemukan negara-negara pengklaim dalam suatu forum guna menemukan solusi penyelesaian sengketa di kawasan ini yang dapat diterima semua pihak dan membangun *Confidence Building Measure* (CBM) antar semua negara yang memiliki kepentingan di kawasan perairan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> KOMPAS, edisi 11 Agustus 2012 *Meningkatkan Stabilitas Laut China Selatan*. Diakses pada tanggal 6 November 2012

<sup>11</sup> “Memperkuat Bargaining Power Indonesia Guna Menjaga Keamanan Kawasan ASEAN”. [http://lemhannasjurnal.com/?pg=esai\\_detail&mn\\_id=10&esai\\_id=10](http://lemhannasjurnal.com/?pg=esai_detail&mn_id=10&esai_id=10) . Diakses pada tanggal 2 Desember 2012

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Mengapa Indonesia turut berperan aktif dalam penyelesaian kasus sengketa di Laut China Selatan?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini berjudul “PERAN AKTIF INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN” bertujuan untuk mengetahui :

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.
2. Alasan Indonesia yang turut berperan aktif dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.

### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk menganalisa peran aktif Indonesia dalam konflik di Laut China Selatan maka diperlukan teori dan konsep guna mengkajinya. Penulis menggunakan konsep netralitas, teori pengambilan keputusan, dan konsep kepentingan nasional.

## 1. Konsep Orientasi Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan : tindakan atau gagasan, yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan-yaitu, dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara lain.<sup>12</sup>

Tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai bidang isu internasional paling sedikit merupakan suatu ungkapan orientasi umumnya terhadap bagian dunia lain.<sup>13</sup> Yang dimaksud orientasi disini ialah: sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya dan untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan. Strategi atau orientasi umum suatu bangsa jarang diungkapkan dalam suatu keputusan, tetapi merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif yang diambil dalam upaya untuk menyesuaikan tujuan, nilai, dan kepentingan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domestik dan eksternal.<sup>14</sup> Orientasi kebijakan luar negeri mencakup tiga hal:

1. Isolasi
2. Non Blok
3. Pembentukan koalisi dan aliansi

---

<sup>12</sup>K.J. Holsti, *Politik Internasional, Sebuah Kerangka untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga. Alih bahasa M. Tahir Azhary. Edisi keempat jilid I. 1988. Hal.107

<sup>13</sup> Sugiri. *Sikap Indonesia terhadap Revolusi Suriah 2011-2012*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2012. Hal. 17

<sup>14</sup> K.J Holsti. *Op.Cit*. Hal.108

Berdasarkan klasifikasi di atas, dalam konteks konflik Laut China Selatan Indonesia orientasi kebijakan luar negeri Indonesia cenderung bersifat netral.

Netralitas / *neutrality* adalah status hukum untuk tidak melibatkan diri dalam perang serta menetapkan hak dan kewajiban tertentu terhadap negara yang berperang.<sup>15</sup> Pengakuan hak netralitas ini mencakup jaminan untuk tidak dilanggar wilayahnya oleh negara yang bertikai; penerimaan asas netral yang tidak memihak; menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada pihak yang terlibat pertentangan atau peperangan; dan tidak dikenakan sanksi ekonomi.<sup>16</sup>

Peran aktif Indonesia dengan tidak memihak manapun yang turut serta dalam konflik Laut China Selatan merupakan salah satu cerminan dari politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif seperti yang mengalir dari filsafat negara Indonesia pancasila dan berlandaskan alinea ke empat Undang – Undang Dasar 1945, yaitu bahwa pemerintah Indonesia “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>17</sup> Dalam pembuatan garis-garis besar politik luar negeri tersebut seperti dijumpai dalam politik bebas aktif itu tentu saja meliputi dasar – dasar berikut yang turut mempengaruhi dan menentukannya, yaitu: *Physical Geography, Economic Geography, Human Geography, Technology, dan Ideology, the National Mind, dan Geopolitics*.<sup>18</sup> Dalam konteks konflik Laut China Selatan ini, artian bebas yakni dengan tidak memihak, sedangkan aktif yakni

---

<sup>15</sup> Jack C. Plano. *Kamus Hubungan Internasional*. Putra A Bandin. 1999. Hal. 239

<sup>16</sup> B.N. Masbun, SH. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005. Hal. 327

<sup>17</sup> *Ibid*. Hal. 447

<sup>18</sup> *Ibid*

Indonesia turut serta dan tergabung dalam organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN dan tetap mengupayakan perdamaian kawasan.

## **2. Teori pengambilan keputusan (*Decision Making Theory*)**

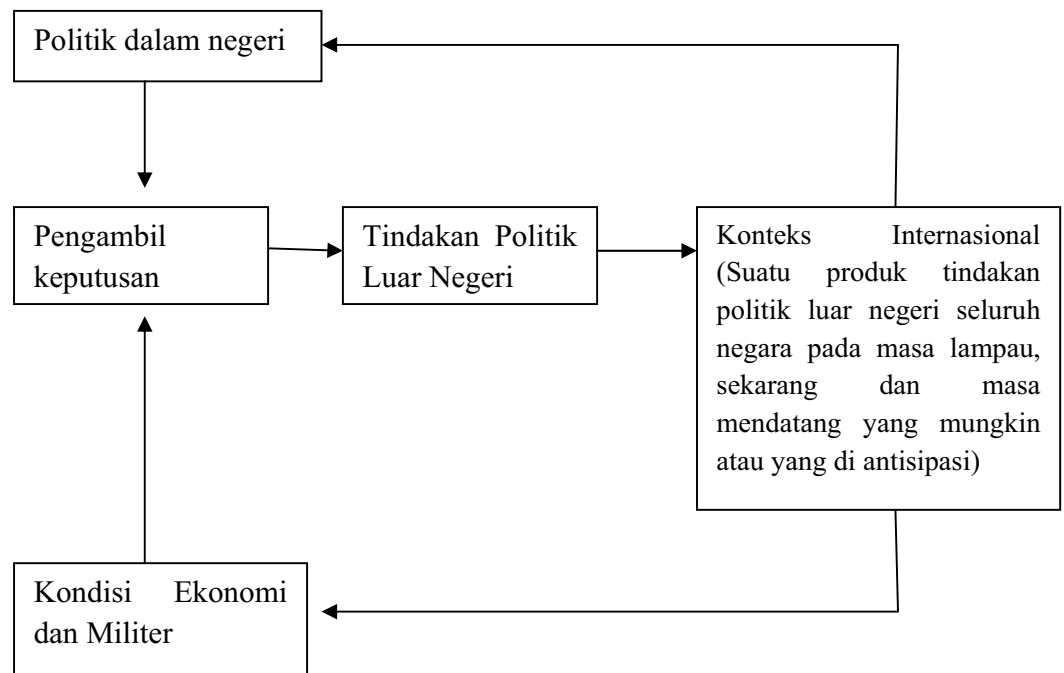
Menurut teori pembuatan keputusan William D.Coplin, politik luar negeri bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Tiga pertimbangan tersebut, yakni: (1) Kondisi politik dalam negeri (2) Kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer (3) Konteks Internasional, yaitu posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain dalam system internasional itu.<sup>19</sup>

Menurut William D. Coplin, gambar dibawah ini dapat menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang telah disebutkan di atas saling berinteraksi sehingga menghasilkan tindakan politik luar negeri:

---

<sup>19</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, edisi ke-2* . Bandung : Sinar Baru . 1992. Hal.30

**Gambar 1. Proses pengambilan keputusan menurut William D. Coplin**



**William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis**

Menurut gambar diatas, politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan – tindakan aktor rasional yang memang cenderung berpikir bahwa keputusan dibuat secara rasional. Penghitungan secara rasional termasuk di dalamnya penghitungan untung – rugi dalam pengambilan keputusan dimana terdapat kepentingan baik itu murni kepentingan negara atau kepentingan pribadi dari pengambil keputusan.

## 1. Faktor Politik dalam negeri

Menurut William D. Coplin, peran politik dalam negeri yang turut memberikan pengaruh dalam penyusunan politik luar negeri dengan membedakan empat tipe *policy influencers*, yakni: partisan, birokratis, kepentingan, dan *mass influencers*.<sup>20</sup>

### a. *Partisan influencers*

*Partisan influencers* ini bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan, yaitu tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. Influencers ini berupaya untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan personel-personel yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan.<sup>21</sup>

*Influencers* ini dipandang sebagai informasi dua arah dan mempengaruhi saluran di antara para pengambil keputusan resmi dan anggota masyarakat.<sup>22</sup> *Partisan influencers* biasanya lebih banyak memfokuskan pada kebijakan dalam negeri, namun juga tidak mengabaikan kebijakan luar negeri terutama apabila kebijakan luar negeri tersebut memberi pengaruh dalam negeri.

---

<sup>20</sup> William D. Coplin. *Op.Cit.* Hal. 82

<sup>21</sup> *Op.Cit.* Hal. 84

<sup>22</sup> *Ibid*

b. *Bureaucratic influencers*

Istilah *bureaucratic influencers* ini digunakan untuk menunjukkan kepada individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan.<sup>23</sup>

Kelompok-kelompok birokratis ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan karena kelompok-kelompok ini menyalurkan informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan.<sup>24</sup>

c. *Policy influencers*

*Interest influencers* terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari *policy influencers* atau pengambil keputusan yang lain. Umumnya kepentingan ini bersifat ekonomis karena orang-orang sering dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektif melalui persamaan kepentingan ekonomi.<sup>25</sup> Kepentingan-kepentingan yang bersifat non ekonomis juga bisa digunakan sebagai dasar tindakan

---

<sup>23</sup> *Op.Cit.* Hal. 82

<sup>24</sup> *Op.Cit.* Hal. 83

<sup>25</sup> *Op.Cit.* Hal. 87



kolektif, terutama apabila ada ikatan-ikatan etnis atau geografis di antara mereka.<sup>26</sup>

*Ineterest influencers* merupakan faktor yang penting dalam penyusunan politik luar negeri, karena mereka mempengaruhi kompleksitas proses politik dalam negeri.<sup>27</sup>

d. *Mass Influencers*

Opini publik atau *mass influencers* lebih mengacu pada iklim opini yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Dampak sikap *mass influencers* bagi pengambil keputusan luar negeri sangat beraneka ragam, sesuai dengan tipe sistem politiknya.<sup>28</sup>

Opini publik digunakan oleh pengambil keputusan dan *policy influencers* lainnya, seolah-olah sekadar suatu kekuatan yang mengarahkan para pengambil keputusan. Para pejabat menggunakan opini publik untuk merasionalisasi tindakan-tindakan politik luar negeri, bukan untuk membentuk kebijakan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Op.Cit.* Hal. 88

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Op.cit.* Hal. 90

## 2. Faktor Ekonomi dan Militer

Pengambil keputusan luar negeri juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan militer, serta memperhatikan kelemahan negara dalam penyusunan politik luar negeri. Para pembuat keputusan luar negeri harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer.<sup>30</sup>

Secara historis, faktor-faktor ekonomi dan militer saling berkaitan sekali dengan pembentukan politik luar negeri suatu negara. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan militer acapkali digunakan suatu negara dalam proses tawar-menawar dalam politik internasional. Terlebih dewasa ini kekuatan militer dan ekonomi menjadi nilai lebih guna meraih kredibilitas dan citra bagi sebuah negara di mata internasional.

## 3. Faktor konteks internasional

Secara tradisional para analis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antar negaraa negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu, menentukan bagaimana negara akan berperilaku.<sup>31</sup> Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif. Kepentingan nasional ini

---

<sup>30</sup> *Op.Cit.* Hal. 110

<sup>31</sup> *Op.Cit.* Hal. 165

adalah faktor penentu dalam politik luar negeri suatu negara.<sup>32</sup> Kondisi internasional sebagai suatu perangkat faktor yang mempengaruhi aktivitas politik luar negeri negara.

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis. Geografi masih memainkan peran politik luar negeri yang penting meskipun bukan peran terpenting seperti di masa lalu, beberapa kondisi geografis masih merupakan bagian yang konstan dari keputusan politik luar negeri.<sup>33</sup> Selain faktor geografis, faktor hubungan ekonomi juga merupakan bagian yang penting dalam konteks internasional. Baik arus barang dan jasa maupun arus modal membuat sebagian negara-negara tertentu bergantung terhadap negara lainnya. Yang terakhir, adalah hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan sebuah kompleksitas yang turut mempertimbangkan berbagai faktor di dalamnya.

Adapun landasan pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mensikapi konflik Laut China Selatan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diungkapkan dalam tabel di atas, faktor konteks internasional memberi

---

<sup>32</sup> *Op.Cit.* Hal. 166

<sup>33</sup> *Op.Cit.* hal. 167

pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia, mengingat Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan ASEAN serta Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung di ASEAN sehingga memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga integritas ASEAN selain itu kerjasama-kerjasama multilateral dalam aspek ekonomi dan keamanan Indonesia dengan negara-negara yang turut bersengketa dalam konflik Laut China Selatan turut menyumbangkan alasan netralitas Indonesia dalam mensikapi konflik ini, meski demikian faktor *policy influencers* lainnya tidak dapat dikesampingkan.

### 3. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.<sup>34</sup> Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, adalah sebagai berikut:

*“National interest is the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decisions makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements of constitute the state most vital needs. These include self-preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being.”*<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Jack C. Plano. *The International Relations Dictionary.*, USA. 1969. Hal.7

<sup>35</sup> Jack C. Plano and Roy Olton,*Op.cit.* Hal. 128

Hans J. Morgenthau juga menambahkan pengertian dari konsep kepentingan nasional sebagai berikut: “kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.”<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam perumusan politik kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum namun menjadi unsur yang sangat vital bagi sebuah negara. Unsur tersebut mencakup berbagai aspek seperti kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Indonesia sebagai sebuah negara tentunya memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Terlebih bila ditambah dengan pemahaman konsep geopolitik yang dapat dimaknai dengan pengambilan kebijakan atau strategi nasional yang didasarkan pada aspek nasional geografik, maka tidaklah mengherankan apabila Indonesia turut berperan aktif dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. Berkaitan dengan peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan, pasti terdapat kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia. Kepentingan– kepentingan tersebut misalnya untuk tetap mempertahankan kerjasama–kerjasama multilateral dalam aspek ekonomi dan keamanan antara

---

<sup>36</sup> Mohtar Mas’ oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. 1990. Hal. 140

Indonesia dengan negara-negara yang turut bersengketa dalam konflik Laut China Selatan selain itu juga untuk tetap mengamankan kepentingan-kepentingan Indonesia di Laut China Selatan.

#### **F. Hipotesa**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil hipotesa bahwa peran aktif yang dilakukan oleh Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan berdasarkan atas berbagai pertimbangan, yakni:

1. Posisi strategis ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia.
2. Adanya kerjasama strategis dalam sektor keamanan dan ekonomi antara Indonesia dengan Republik Rakyat China.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka. Data yang diolah merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku, artikel, koran, jurnal, internet, dokumen serta sumber – sumber lain yang relevan sehingga dapat dijadikan acuan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan.

## **H. Batasan Penelitian**

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai sikap-sikap Indonesia selama ini terhadap konflik Laut China Selatan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam jangka waktu 2011 ketika konflik Laut China Selatan ini kembali memanas hingga tahun 2012.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pada BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II akan membahas mengenai fenomena konflik Laut China Selatan di kawasan ASEAN. BAB III akan membahas mengenai Politik Luar Negeri Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. BAB IV akan membahas mengenai alasan serta upaya peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. BAB V merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.